

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Hal ini karena, pada dasarnya aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output yang diukur dengan menggunakan indikator PDB.

##### **2.1.1 Teori Pertumbuhan**

###### **2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Harrod-Domar**

Pertumbuhan Model pertumbuhan Harrod-Domar melihat pentingnya investasi terhadap pertumbuhan ekonomi sebab investasi akan meningkatkan stok barang modal yang memungkinkan peningkatan output. Sumber dana domestik untuk keperluan investasi berasal dari bagian produksi (pendapatan nasional) yang ditabung. Tingkat output suatu perekonomian mempunyai hubungan proporsional (konstan) dengan jumlah stok barang modal. Model Pertumbuhan Harrod-Domar dapat dijelaskan sebagai berikut (Todaro dan Smith, 2011: 136-137).

- a. Tabungan ( $s$ ) adalah bagian dalam jumlah tertentu, atau  $s$ , dari pendapatan nasional ( $Y$ ) yang dapat ditulis dalam persamaan:

$$S = s.Y \quad (2.2)$$

- b. Investasi netto (I) didefinisikan sebagai perubahan stok modal (K) yang dapat diwakili oleh  $\Delta K$ , sehingga:

$$I = \Delta K \quad (2.3)$$

Jumlah stok modal (K) mempunyai hubungan langsung dengan jumlah pendapatan Nasional atau *Output* (Y) seperti telah ditunjukkan oleh rasio modal-Output (k), maka:

$$K/Y = k \quad (2.4)$$

$$\text{Atau} \quad \Delta K/\Delta Y = k \quad (2.5)$$

$$\text{Atau, akhirnya} \quad \Delta K = k\Delta Y \quad (2.6)$$

- c. Tabungan nasional netto (S) harus sama dengan Investasi netto (I), maka :

$$S = I \quad (2.7)$$

Dari persamaan (2.2) dan persamaan (2.5), maka dapat ditulis persamaan:

$$S = sY = k\Delta Y = \Delta K \quad (2.8)$$

Atau diringkas menjadi

$$sY = k\Delta Y \quad (2.9)$$

Berdasarkan persamaan (2.9) maka dapat ditulis:

$$\Delta Y/Y = s/k \quad (2.10)$$

Persamaan (2.10) atau  $\Delta Y/Y$ , sebenarnya merupakan tingkat perubahan atau tingkat perubahan PDB (angka persentase perubahan PDB). Ini menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan PDB ( $\Delta Y/Y$ ) ditentukan secara Bersama-sama oleh rasio tabungan nasional (s) dan rasio modal-*output* nasional (k). Secara spesifik, persamaan tersebut tanpa intervensi

pemerintah, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional akan secara langsung atau secara positif berbanding lurus dengan rasio tabungan dan secara negatif atau berbanding terbalik terhadap rasio modal-*output* dari suatu perekonomian.

### 2.1.2 Peran Pemerintah

Peran pemerintah secara garis besar ada 2, yaitu Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter. Pada fase awal pembangunan, investasi harus dilakukan di bidang-bidang yang meningkatkan ekonomi eksternal yaitu yang mengarah pada penciptaan *overhead* sosial dan ekonomi seperti tenaga, transportasi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Dan swasta tidak tertarik untuk melaksanakan kegiatan - kegiatan tersebut karena resiko besar dan keuntungannya kecil. Dan dari sini timbullah penyeimbangan pertumbuhan berbagai sektor perekonomian sehingga penawaran sesuai dengan permintaan. Pengawasan dan pengaturan oleh negara, menjadi sangat penting dalam rangka mencapai keseimbangan pertumbuhan. Keseimbangan memerlukan pengawasan atas produksi, distribusi dan konsumsi komoditi.

Untuk tujuan ini, pemerintah harus merencanakan pengawasan fisik dan langkah – langkah fiskal dan moneter. Ruang lingkup tindakan pemerintah sangat luas dan menyeluruh. Menurut Prof. Lewis lingkup itu mencakup “Penyelenggaraan pelayanan umum, menentukan sikap, membentuk Lembaga-lembaga ekonomi, menentukan penggunaan sumber, menentukan distribusi pendapatan, mengendalikan jumlah uang, mengendalikan fluktuasi, menjamin pekerjaan penuh, dan menentukan laju investasi.”

Adanya problema di bawah ini :

Menurut pandangan ekonomi klasik, negara dalam hal ini pemerintah diharapkan melakukan intervensi di luar persoalan ekonomi di antaranya:

1. Melindungi masyarakat dari kekerasan dan invasi dari kelompok masyarakat bebas lainnya.
2. Menjaga setiap anggota masyarakat dari praktik berbagai bentuk ketidakadilan dan operasi dari anggota masyarakat lainnya.

3. Menegakkan dan merawat pekerjaan-pekerjaan publik dan Lembaga publik. Ekonomi klasik menganggap bahwa pemerintah sedapat mungkin tidak turut campur tangan dalam masalah ekonomi. Karena dalam pandangan ekonomi klasik, pasar dapat memberikan garansi dan menggerakkan kegiatan ekonomi. Karena pasar sebagai penggerak perekonomian maka peran negara dibatasi hanya pada persoalan non-ekonomi (Yustika, 2009:28)

## **2.2 Teori Korupsi**

### **2.2.1 Definisi dan Dampak Korupsi**

Korupsi yang bersal dari bahasa latin, *corruption* atau *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparansi Internasional*, korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus, pegawai negeri, yang secara tidak wajar/legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan. Zeleha Othman, dkk (2014) mendefinisikan korupsi kedalam dua aspek, yaitu eksplisit dan implisit. Aspek eksplisit membahas korupsi dari

karakteristik fisik tindakan tersebut, menekankan korupsi sebagai perilaku menyimpang demi keuntungan pribadi. Sedangkan aspek implisit menjelaskan korupsi berdasarkan proses melakukan tindakan (perilaku menyimpang dan keuntungan pribadi).

Korupsi bukanlah fenomena baru, sudah terjadi sejak ratusan tahun lalu. Berbagai kebijakan dan metode telah diterapkan oleh semua negara di dunia dalam rangka mengurangi tingkat korupsi. Namun, masyarakat dunia masih berjuang melawan korupsi hingga saat ini.

Mereka berjuang untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Tanzi (1998) dalam penelitiannya melakukan identifikasi penyebab korupsi pemerintahan menjadi beberapa poin, seperti:

- a. Peraturan dan otoritas
- b. Pajak
- c. Keputusan pengeluaran atau *spending decisions*
- d. Ketentuan barang dan jasa di bawah harga pasar atau *provision for goods and services at below-market prices*.
- e. Pembiayaan partai politik atau *financing of parties*
- f. Keputusan kebijakan lain atau *other discretionary decisions* seperti yang dipaparkan Bhargava(2005) meliputi:
  - Sistem ekonomi dan politik yang tertutup
  - Faktor sejarah dan budaya

Dari beberapa penyebab korupsi yang telah dijelaskan diatas, jelas bahwa korupsi berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan dan sistem birokrasi di suatu

negara. Korupsi memiliki dampak yang berbeda untuk setiap negara, juga tergantung tingkat skala terjadinya dan sektor mana korupsi terjadi. Lalu Bhargava (2005) merangkum konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan dari korupsi menjadi beberapa poin berikut:

- a. Korupsi melemahkan pembangunan ekonomi. Korupsi mengurangi pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi insentif untuk investasi produktif, baik oleh penduduk domestik maupun asing. Suap bertindak sebagai pajak yang tidak dapat diprediksi, mengganggu kegiatan ekonomi dan menyebabkan inefisiensi. Korupsi juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dengan menurunkan kualitas infrastruktur dan layanan publik, karena dana yang ditujukan untuk barang publik dialihkan ke kantong swasta atau pejabat.
- b. Korupsi melemahkan stabilitas politik dan legitimasi pemerintah. Korupsi memicu timbulnya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga menurunkan tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam memonitor kerja pemerintah.
- c. Korupsi merusak tatanan sosial. Secara ekstrim, korupsi dapat membuat mayoritas warga merasa terasing dari pemerintah mereka dan proses pemilihan umum dapat membahayakan demokrasi itu sendiri. Korupsi yang tersebar luas juga merusak nilai-nilai bersama masyarakat dan kepercayaan timbal balik yang memungkinkan hubungan sosial dan ekonomi.
- d. Korupsi membahayakan alokasi sumber daya untuk sektor-sektor yang penting untuk pembangunan. Ketika korupsi menjadi endemik dan meluas,

pemerintah dapat mengembangkan pilihan untuk mengalokasi sumber daya ke sektor-sektor dan proyek-proyek lain, seperti pengadaan militer, di mana transparansi lebih sulit dicapai dan kesepakatan rahasia mudah dibuat. Pengalihan sumber daya ini biasanya datang dengan mengorbankan sektor sosial yang kurang dapat dikorupsi, seperti kesehatan dan pendidikan, dengan demikian korupsi melemahkan pembangunan negara.

- e. Korupsi mendukung dan mempertahankan adanya kegiatan ilegal lain. lingkungan politik yang kondusif untuk korupsi memperkuat permintaan akan barang dan jasa ilegal. Negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi dapat menjadi target untuk jaringan kejahatan.

Pemahaman oleh masyarakat terhadap berbagai macam dampak korupsi terhadap kehidupan manusia diharapkan dapat menciptakan norma dan budaya anti korupsi dalam masyarakat Indonesia khususnya. Penolakan masyarakat terhadap korupsi yang terjadi dalam suatu negara mampu meningkatkan tingkat deteksi terhadap korupsi. Sebaliknya, pembiaran atau penerimaan masyarakat terhadap korupsi akan membuat korupsi semakin merajalela dan menjadi pola-pola perilaku yang sangat merugikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penolakan masyarakat terhadap koruptor dan perbuatan korupsi menyebabkan sanksi sosial terhadap korupsi menjadi tinggi, sehingga mengurangi niat koruptor untuk melakukan korupsi.

### **2.2.2 Pengaruh Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Korupsi pada dasarnya terjadi di semua negara, baik negara berkembang atau maju. Meskipun secara umum korupsi dipandang sebagai suatu penyakit dalam

kehidupan masyarakat, namun pengaruh pertumbuhan ekonomi dengan korupsi masih diperdebatkan oleh para ahli ekonomi dengan argumennya masing-masing. Dampak korupsi yang berbeda pula antara negara satu dengan negara lainnya.

Toke S.Aidt (2003) menjelaskan bahwa terdapat dua hipotesis dalam korupsi. Hipotesis pertama '*Greasing the Wheels*' yaitu, korupsi bermanfaat bagi pertumbuhan dan pembangunan karena dapat mengurangi hambatan administrasi.

Hipotesis kedua '*Sand in the Wheels*' yaitu, korupsi menghambat pertumbuhan dan pembangunan karena menciptakan misalokasi sumber daya, meningkatkan biaya transaksi, dan efek negatif lain.

Hipotesis pertama dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rock dan Bonnett (2004) bahwa korupsi menghambat pertumbuhan dan atau mengurangi investasi di negara – negara berkembang, lebih spesifiknya negara-negara miskin, namun meningkatkan pertumbuhan di negara-negara industry baru Asia Timur. Ini didukung oleh penelitian lain dari Chiung-Ju Huang(2015) di tiga belas negara-negara Asia-Pasifik bahwa ada pengaruh kausalitas positif yang signifikan antara korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan dan China, dan tidak ada pengaruh kausalitas yang signifikan di sebelas negara lain. sementara hipotesis kedua dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Fraj dan Lachhab(2015) bahwa korupsi memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di dua puluh enam negara berkembang.

Korupsi dapat memberikan dampak buruk yang menyeluruh terhadap perekonomian. Dampak buruk ini seperti munculnya inefisiensi dalam biaya produksi, misalokasi sumber daya, serta turunnya kualitas produk yang kemudian



menyebabkan penurunan permintaan. Turunnya permintaan ini membuat aliran investasi turun, kemudian kualitas modal fisik dan manusia juga turut turun. Ini secara langsung atau tidak langsung menghambat pertumbuhan ekonomi (Chiam Chooi Chea, 2015). Adanya sikap torelir terhadap kesediaan untuk mengakomodasi korupsi di masa sekarang akan menyebabkan lingkaran setan. Dimana tingkat intervensi pemerintah semakin tinggi menyebabkan terjadinya inefisiensi pasar serta meningkatkan tingkat korupsi secara berkelanjutan di masa mendatang. Kegagalan untuk menginternalisasikan eksternalitas antargenerasi ini dapat membahayakan efektivitas jangka panjang dari kebijakan yang dimaksudkan dengan tujuan baik (Alesina dan Angeletos, 2005). Pernyataan ini diperkuat oleh penelitian Pak Hung Mo(2001) menemukan bahwa saluran terpenting korupsi untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ialah melalui kondisi politik yang tidak stabil, menyumbang 53 persen dari keseluruhan efek. Sisanya melalui *Human Capital* dan investasi.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan korupsi merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor. Korupsi merusak tatanan masyarakat yang beradab, mempengaruhi segala macam institusi baik itu pemerintahan, polisi, tantara, bank, organisasi amal, dan klub sosial. Korupsi menghasilkan ketidakadilan biaya sosial yang tinggi. Korupsi membatasi pertumbuhan ekonomi dan membuat jutaan orang lebih miskin dari yang seharusnya (Sohmen, 1999).

### **2.3 Pengeluaran Pemerintah**

Pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian makro melalui dua saluran kebijakan: kebijakan fiskal dan kebijakan moneter (Mankiw,2006). Kebijakan

Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.

### **2.3.1 Kebijakan Anggaran/ Politik Anggaran**

Kebijakan Anggaran dibagi menjadi tiga, yaitu anggaran defisit, anggaran surplus dan anggaran berimbang dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama adalah anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif. Kebijakan anggaran yang kedua adalah anggaran surplus (*surplus budget*)/kebijakan fiskal kontraktif yang merupakan kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (*overheating*) untuk menurunkan tekanan permintaan. Kebijakan anggaran yang ketiga adalah anggaran berimbang yaitu terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin. Mangkoesoebroto (1991) menyebutkan bahwa teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

## **1. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah**

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Pada tahap awal, kontribusi pengeluaran pemerintah untuk investasi lebih besar dalam rangka penyediaan prasarana, pendidikan, kesehatan dan pelayanan publik lainnya. Pada tahap berikutnya, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, diikuti dengan kontribusi investasi sektor swasta yang semakin besar.

Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase PNB semakin besar dan persentase investasi pemerintah terhadap PNB semakin kecil. Pada tahap lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktifitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktifitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, dan sebagainya.

## **2. Hukum Wagner**

Berdasarkan pengamatannya di negara-negara Eropa, US dan Jepang pada abad ke-19, Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah. Wagner tidak mengemukakan pendapatnya dalam bentuk hukum karena dalam teorinya tidak dijelaskan maksud dari pertumbuhan, pengeluaran pemerintah dan PNB, apakah dalam pengertian pertumbuhan secara relatif atau absolut. Jika yang dimaksud Wagner adalah pengeluaran pemerintah secara relatif, maka hukum Wagner adalah: dalam suatu perekonomian, jika

pendapatan per kapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\frac{P_k PP_1}{PPK_1} < \frac{P_k PP_2}{PPK_2} < \dots < \frac{P_k PP_3}{PPK_3}$$

Hukum Wagner memiliki kemelahan karena tidak didasarkan pada teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasari pemikirannya pada suatu teori organis mengenai pengeluaran pemerintah yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bertindak bebas, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

### 3. Teori Peacock dan Wiseman

Teori Peacock dan Wiseman didasarkan pada suatu analisa bahwa pemerintah senantiasa memperbesar pengeluarannya, sementara di satu sisi, masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Masyarakat mempunyai toleransi membayar pajak, yaitu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Adanya tingkat toleransi tersebut membuat pemerintah tidak dapat menaikkan pajak dengan semena-mena. Teori Peacock dan Wiseman mengenai pengeluaran pemerintah adalah sebagai berikut : Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat meskipun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya PNB menyebabkan

penerimaan pemerintah semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran-pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

## **2.4 Foreign Direct Investment (FDI)**

FDI (*Foreign Direct Investment*) atau investasi langsung luar negeri adalah salah satu ciri penting dari sistem ekonomi yang kian meng-global. Hal ini bermula saat sebuah perusahaan dari satu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini perusahaan yang ada di negara asal (biasa disebut '*home country*') bisa mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (biasa disebut '*host country*') baik sebagian atau seluruhnya. Caranya dengan si penanam modal membeli perusahaan di luar negeri yang sudah ada atau menyediakan modal untuk membangun perusahaan baru di sana atau membeli sahamnya sekurangnya 10% (Ulum, 2014).

Peningkatan pada FDI juga berdasarkan beberapa motivasi antara lain :

1. *market-seeking*, ketersediaan pasar domestik dan pada umumnya dihubungkan antara ukuran pasar dengan pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, akses perdagangan antar negara sekitar, dan selera dari masyarakat negara yang akan di pilih.
2. *resource-asset*, berdasarkan jumlah bahan baku seperti sumber daya alam, biaya tenaga kerja, angkatan kerja, tenaga kerja terampil, infrastruktur fisik (jalan, pelabuhan, dan telekomunikasi), dan teknologi.
3. *efficiency-seeking* yaitu biaya produksi yang lebih rendah dalam melakukan

Menurut David K. Eiteman motif yang mendasari produktivitasnya (Fachriza, 2015). Agma (2015) mengatakan pertumbuhan ekonomi meliputi peningkatan dan mendorong kemakmuran serta kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari adanya investasi terutama bagi negara berkembang.

Adanya FDI meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sumberdaya manusia yang ahli dalam bidangnya, peningkatan infrastruktur dalam pembuatan jalan untuk membantu mendistribusikan hasil produksi, serta meningkatkan tingkat ekspor.

Penanaman modal asing ada tiga; motif strategis, motif perilaku dan motif ekonomi. Dalam motif strategis dibedakan dalam: 1) Mencari pasar 2) Mencari bahan baku 3) Mencari efisiensi produksi 4) Mencari pengetahuan 5) Mencari keamanan politik Sedangkan motif perilaku merupakan rangsangan lingkungan eksternal dan yang lain dari organisasi didasarkan pada kebutuhan dan komitmen individu atau kelompok. Dan motif ekonomi merupakan motif untuk mencari keuntungan dengan cara memaksimalkan keuntungan jangka panjang dan harga pasar saham perusahaan.

Dunning menjelaskan bahwa terdapat tiga motif perusahaan dalam melakukan investasi asing yaitu: 1) *Locational Advantage* yang terdiri dari biaya tenaga kerja yang rendah, produktivitas tenaga kerja, tingkat pajak yang rendah, kualitas infrastruktur dan lain sebagainya. 2) *Internalizational Advantages* berhubungan dengan kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan itu sendiri dari pada dijalankan perusahaan lain melalui lisensi. 3) *Ownership Advantage* meliputi

keunggulan perusahaan yang melebihi dari kompetitornya dalam hal pemasaran dan teknologi.

#### 2.4.1 Manfaat FDI

Panayotou dalam Sarwedi (2002) menjelaskan bahwa FDI lebih penting dalam menjamin kelangsungan pembangunan dibandingkan dengan aliran bantuan atau modal portofolio, sebab terjadinya FDI disuatu negara akan diikuti dengan *transfer of technology, know-how, management skill*, resiko usaha relatif kecil dan lebih *profitable*. Aliran modal dari suatu negara ke negara lainnya bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, yang lebih produktif dan juga sebagai diversifikasi usaha. Hasil yang diharapkan dari aliran modal internasional adalah meningkatnya output dan kesejahteraan. Disamping peningkatan *income* dan *output*, keuntungan bagi negara tujuan dari aliran modal asing adalah:

- 1) Investasi asing membawa teknologi yang lebih mutakhir. Besar kecilnya keuntungan bagi negara tujuan tergantung pada kemungkinan penyebaran teknologi yang bebas bagi perusahaan.

- 2) Investasi asing meningkatkan kompetisi di negara tujuan. Masuknya perusahaan baru dalam sektor yang tidak diperdagangkan (*non tradable sector*) meningkatkan output industri dan menurunkan harga domestik, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan.

- 3) Investasi asing dapat berperan dalam mengatasi kesenjangan nilai tukar dengan negara tujuan (*investment gap*). Masuknya investasi asing dapat mengatasi

masalah tidak tercukupinya valuta asing yang digunakan untuk membiayai impor faktor produksi dari luar negeri.

FDI sangat bermanfaat bagi pembangunan perekonomian suatu negara, terutama pembangunan infrastruktur. Dengan pembangunan infrastruktur maka akan terjadipenyerapan tenaga kerja, sehingga FDI juga bisa dikatakan dapat menurunkan angka pengangguran. Aliran dana FDI ini juga akan meningkatkan ekspor suatu negara, akibat penambahan modal untuk biaya produksi maka sumber daya dapat lebih efisien diolah. Menurut Sukirno (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.

Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni:

- a) Investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja.
- b) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi.
- c) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Menurut Krugman dan Obstfeld(2012) FDI merupakan aliran dana masuk (*capital inflow*) ke suatu negara yang meliputi investasi asset-aset riil. Secara umum, investasi langsung (FDI) didefinisikan sebagai investasi yang bersifat jangka panjang dilakukan langsung oleh negara pemberi di suatu bidang usaha dalam negeri. Karena sifatnya jangka Panjang, investasi dalam bentuk FDI ini diyakini



akan membantu meningkatkan perekonomian suatu negara yang membutuhkan dana dan penyerapan tenaga kerja yang besar. Besarnya FDI yang masuk mengindikasikan bahwa negara pemberi semakin percaya dan tertarik untuk menanamkan modalnya di dalam negeri.

#### **2.4.2 Teori Investasi**

1) Teori Neo Klasik Teori ekonomi mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Di samping kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan taraf kemakmuran masyarakat.

Tiga fungsi penting dari kegiatan investasi dalam perekonomian yaitu sebagai berikut:

- 1) Investasi merupakan komponen dari pengeluaran agregat
- 2) Pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas memproduksi di masa depan dan perkembangan ini akan menstimulir pertumbuhan produksi nasional dan kesempatan kerja.
- 3) Investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi. Teori investasi ini dinamakan teori neo klasik karena pandangan dasarnya dilandaskan kepada pemikiran ahli-ahli ekonomi klasik mengenai penentuan keseimbangan faktor-faktor produksi oleh perusahaan-perusahaan (Sukirno, 2000).

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian (Mauro P. , 1997) menunjukkan bahwa korupsi memberikan konsekuensi antara pertama melemahkan investasi dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi berkurang. Kedua, terjadinya *talent miss allocated*. Artinya korupsi menempatkan orang bukan pada tempatnya. Ketiga aliran pinjaman dan hibah dari luar negeri mengalami misalokasi. Fenomena ini biasanya terjadi pada negara-negara berkembang yang sangat mengandalkan utang dan bantuan luar negeri. Keempat, melemahnya penerimaan pemerintah dari pajak, sehingga akan mempengaruhi komposisi pengeluaran pemerintah. Hal ini akan berdampak terhadap semakin tidak baiknya penyediaan barang dan jasa publik (baik kuanlitas dan kualitas).

Swaleheen & Stansel (2007) di dalam penelitiannya yang berjudul "*Economic Freedom, Corruption and Growth*", mengestimasi 60 negara dengan menggunakan metode panel data. Hasil yang didapat oleh Swaleheen adalah bahwa korupsi dapat menurunkan pertumbuhan ketika pelaku ekonomi memiliki pilihan yang sedikit (kebebasan ekonomi yang rendah). Tetapi jika orang menghadapi banyak pilihan atau kebebasan ekonomi tinggi, korupsi membantu pertumbuhan dengan menyediakan jalan di sekitar kontrol pemerintah.

Penelitian lain yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Pellegrini dan Gerlagh (2004). Penelitian tersebut bertujuan untuk meneliti pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung di 48 negara periode 1980-1985. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut antara lain *corruption*, *initial income*,

*investment, schooling, openness, dan political stability* Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh langsung korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan ketika memasukkan variabel-variabel dependen lainnya. Namun demikian dijumpai pengaruh tidak langsung korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui saluran investasi dan keterbukaan perdagangan (*openness*).

Penelitian ini merujuk kepada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu tersebut diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Egunjobi dan Adenike (2013). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria pada periode 1980-2009. Hasil penelitian menyebutkan bahwa korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini juga merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Dridi (2013). Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengidentifikasi saluran transmisi di mana korupsi dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Secara ringkas hasil empirik menunjukkan bahwa korupsi berasosiasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi di mana variabel *human capital and political instability*.

Hasil penelitian yang menunjukkan hasil yang cukup berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Barreto (2001). Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui efek korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi, faktor-faktor yang menentukan korupsi, dan hubungan antara korupsi, pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa ternyata korupsi justru berhubungan positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi.

Rachdi dan Saidi (2011) meneliti sampel 100 negara maju dan negara berkembang selama periode 1990-2009, dan menghasilkan temuan adanya hubungan yang positif dan signifikan secara statistik antara investasi langsung dan pertumbuhan ekonomi ketika mempergunakan estimasi GMM, WG, dan GLS (setelah dikelompokkan atas negara berkembang dan negara maju)

Fatimah said, saad Moh said, da Ahmad Farid Osman (2001) meneliti tentang hubungan FDI, pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan Ekonomi di Malaysia selama tahun 1978-2005 dengan menggunakan metode OLS. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekspor, investasi asing, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Malaysia.

Monopoli birokrasi merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap korupsi dalam peraturan kelembagaan. Selain itu melalui pendekatan statistika komparatif, keberhasilan sanksi yang lebih keras dipertanyakan, sedangkan perampangan birokrasi ditemukan memberikan dampak yang signifikan terhadap korupsi (Yang, 2005). Dalam hal pengeluaran pemerintah, Furceri dan Sousa (2009) dengan menggunakan data panel dari 145 negara dalam kurun waktu 1960-2007, menemukan hasil bahwa pengeluaran pemerintah menyebabkan efek crowding out yaitu secara negatif mempengaruhi konsumsi dan investasi sektor swasta.